

**MATRIKS RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
KOTA DEPOK TAHUN 2018—2021**

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET PENCAPAIAN				PD PENANGGUNG JAWAB
			2018	2019	2020	2021	
<b>A. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN</b>							
<b>1. Tim Reformasi Birokrasi dan Road Map RB</b>							
Peningkatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penyusunan LAKIP Kota	Jumlah dokumen Road Map RB	1 dokumen	-	-	-	Bagian Ortala
<b>2. Pemantauan dan Evaluasi RB</b>							
Peningkatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen RB	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Bagian Ortala
<b>3. Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kinerja (sosialisasi, internalisasi, <i>agent of change, role model</i>)</b>							
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Sosialisasi dan Internalisasi RB Kota Depok	Jumlah kegiatan sosialisasi	-	4	4	4	Bagian Ortala
	Survei Internal Kapasitas Organisasi	Jumlah PNS yang disurvei	-	5%	5%	5%	

	Pembentukan <i>Agent of Change</i> dan <i>Role Model</i>	Jumlah PD dan ASN yang menjadi <i>Agent of Change</i> dan <i>Role Model</i>	-	50	50	50	
<b>B. AREA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>							
1. Harmonisasi Produk Hukum Daerah							
Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	Penyelenggaraan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum	-	450	450	450	Bagian Hukum
	Publikasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan dan didokumentasikan	9000 salinan perda 500 salinan perwa	9000 salinan perda 500 salinan perwa	9000 salinan perda 500 salinan perwa	9000 salinan perda 500 salinan perwa	
	Pembinaan Legal Drafting	Jumlah Peserta	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	
2. Sistem pengendalian penyusunan peraturan perUUan (yang mensyaratkan adanya rakor, naskah akademis/kajian/policy paper, dan paraf koordinasi)							
<b>C. AREA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI</b>							
1. Evaluasi dan penataan organisasi untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas							
Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas	Jumlah dokumen Tupoksi	1 dokumen	-	-	-	Bagian Ortala
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Penyusunan Budaya Kerja	Jumlah dokumen	-	1 dokumen	-	-	Bagian Ortala
2. Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tata laksana, pelayanan publik, dan kepegawaian							
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Evaluasi Tupoksi PD	Jumlah dokumen	-	1 dokumen	-	-	Bagian Ortala

#### D. AREA PENATAAN TATA LAKSANA

1. Proses bisnis dan SOP kegiatan utama							
Peningkatan Kualitas SDA	Bimbingan Teknis Penyusunan SOP	Jumlah peserta bimtek	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	Bagian Ortala
Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Penyediaan dan Pemeliharaan E-SOP	Jumlah sistem yang dikembangkan	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem	
2. E-Government							
Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Pengembangan Aplikasi Kearsipan Berbasis TI	Jumlah aplikasi yang dikembangkan		1 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	Diskarpus Diskominfo
	Pemeliharaan Sistem Kearsipan	Jumlah sistem kearsipan yang dipelihara		1 sistem	1 sistem	2 sistem	
	Pengembangan Sistem Aplikasi Pendukung E-Government yang Terintegrasi	Jumlah Aplikasi Pendukung E-Government		6 Aplikasi	6 Aplikasi	8 Aplikasi	
	Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi	Jumlah infrastruktur jaringan		200 Wifi dan 1 kecamatan terhubung FO	50 Titk Wifi, Control Room, 1 Kantor pemerintah terhubung FO	50 Titk Wifi, 1 control room, 3 Kantor Pemerintah terhubung FO	
	Penyediaan Layanan Internet	Jumlah layanan akses internet publik dan aparatur pemerintah		4 Jenis Layanan	4 Jenis Layanan	4 Jenis Layanan	
	Pengelolaan dan Operasional Portal dan Subdomain Pemerintah Kota Depok	Jumlah domain dan Subdomain depok.go.id yang terlayani			1 Portal Domain dan 102 Subdomain	1 Portal Domain dan 110 Subdomain	
3. Keterbukaan Informasi Publik							
Pengembangan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan (PPID)	Jumlah Pelayanan Informasi publik pada setiap PD		39 PPID PD	39 PPID PD	39 PPID PD	Diskominfo

#### E. AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi							
---	--	--	--	--	--	--	--

Peningkatan Kualitas Perencanaan	Penyusunan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK)	Jumlah Dokumen		1 dok	1 dok	1 dok	BKPSDM
	Penyusunan Dokumen Kebutuhan Formasi ASN	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Peningkatan Kualitas SDA	Penataan PNS dalam Jabatan Struktural	Jumlah kegiatan		8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	
	Penataan ASN dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Jabatan Fungsional		36 JFT	38 JFT	40 JFT	
2. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN							
Peningkatan Kualitas SDA	Seleksi Pegawai Perpindahan Wilayah Kerja	Jumlah Peserta		70 Orang	70 Orang	70 Orang	BKPSDM
	Seleksi Pengadaan ASN	Jumlah Pelamar CPNS		3000 orang	3000 orang	3000 orang	
3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (assessment pegawai)							
Peningkatan Kualitas SDA	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Jumlah Dokumen		1 dok	1 dok	1 dok	BKPSDM
	Penataan Kompetensi Aparatur	Jumlah Peserta		100 Orang	100 Orang	100 Orang	
4. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka							
Peningkatan Kualitas SDA	Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah jabatan yang tersedia		2 Jabatan	3 Jabatan	4 Jabatan	BKPSDM
5. Penetapan kinerja individu							
Peningkatan Kualitas SDA	Pengelolaan Informasi Kinerja Aparatur	Jumlah PD yang melaksanakan pengelolaan informasi kinerja aparatur berbasis teknologi informasi		31 PD	35 PD	38 PD	BKPSDM
6. Penegakan aturan disiplin/kode etik pegawai (reward and punishment)							
Peningkatan Kualitas SDA	Penegakan Disiplin Aparatur	Jumlah sidak		20 sidak	20 sidak	20 sidak	BKPSDM
		Jumlah Penanganan Kasus Indisipliner		20 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	
		Jumlah kasus pelanggaran kode etik ASN		5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	

	Sosialisasi, Pembinaan, Pembekalan Peraturan Kepegawaian	Jumlah Peserta		38 PD/300 orang	38 PD/300 orang	38 PD/300 orang	
7. Pelaksanaan evaluasi jabatan (peta jabatan dan kelas jabatan)							
Peningkatan Kualitas Perencanaan	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Jumlah dokumen		1 dok	1 dok	1 dok	BKPSDM
8. Sistem informasi kepegawaian							
Peningkatan Kualitas SDA	Pengelolaan Data dan Pengembangan Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Sistem		1 sistem (2 jenis layanan aplikasi)	1 sistem (4 jenis layanan aplikasi)		BKPSDM
<b>F. AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>							
1. Keterlibatan pimpinan							
Peningkatan Kualitas Perencanaan	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	BAPPEDA
	Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026	Jumlah Dokumen		-	-	1 Dokumen	
2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja							
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan LAKIP Kota	Jumlah dokumen LAKIP Kota Jumlah peserta bimtek E-SAKIP	1 dokumen 40 orang	1 dokumen 40 orang	1 dokumen 40 orang	1 dokumen 40 orang	Bagian Ortala
	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Penyediaan dan Pemeliharaan E-SAKIP	Jumlah sistem yang dikembangkan	1 sistem	1 sistem	1 sistem	
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	NILAI SAKIP Jumlah Dokumen	B 19 Dokumen	B 19 Dokumen	BB 19 Dokumen	A 19 Dokumen	Inspektorat
		Pelaksanaan Evaluasi SAKIP	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP B		40%	50%	
<b>G. AREA PENGUATAN PENGAWASAN</b>							
1. Penanganan gratifikasi (meliputi kebijakan, public campaign, evaluasi, tindak lanjut, LHKASN)							
Program Peningkatan Sistem	Evaluasi RB	Jumlah Peserta TOT UPG	38 orang	38 orang	38 orang	38 orang	Inspektorat

Pengawasan		Jumlah peserta sosialisasi PPK/pengendalian gratifikasi		150 orang	150 orang	150 orang	
		Persentase ASN yang mengisi LHKASN	30%	40%	50%	60%	
<b>2. Meningkatkan penerapan SPIP (penilaian risiko)</b>							
Program Peningkatan Sistem Pengawasan	Pengawasan Internal Secara Berkala / reguler	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal PD sesuai PKPT	15 LHP	20 LHP	20 LHP	20 LHP	Inspektorat
	Penanganan kasus TPTGR	Persentase LHP kerugian daerah selesai ditindaklanjuti	60%	60%	60%	60%	
	Tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase TLHP internal/eksternal yang ditindaklanjuti	Intern 100% Ekstern 92%	Intern 100% Ekstern 92%	Intern 100% Ekstern 92%	Intern 100% Ekstern 92%	
	Pendampingan SPIP	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP level berkembang	16 PD	24 PD	32 PD	38 PD	
<b>3. Whistle-Blowing System</b>							
Program Peningkatan Sistem Pengawasan	Pemeriksaan khusus dan PDTT	Persentase penanganan kasus pengaduan dan tindak pelanggaran disiplin Aparatur Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	Inspektorat
<b>4. Penanganan Benturan Kepentingan</b>							
Program Peningkatan Sistem Pengawasan	Evaluasi RB	Jumlah Peserta FGD PPK	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	Inspektorat
Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan, Permukiman dan TPU	Jumlah Dokumen Penyerahan		30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	BKD
		Sertifikasi Aset tanah	Jumlah Bidang yang terukur		30 Bidang	30 Bidang	
	Jumlah dokumen penelitian tanah			30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	
	Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kota Depok	Jumlah Plang Papan Nama Aset		50 Buah	50 Buah	50 Buah	

5. Pembangunan Zona Integritas							
Program Peningkatan Sistem Pengawasan	Evaluasi RB	Jumlah PD yang dievaluasi sebagai ZI	1 PD	4 PD	4 PD	4 PD	Inspektorat
6. APIP							
Program Peningkatan Kualitas SDA Pemeriksa	Kapabilitas APIP	Level APIP	Level 2 Infrastruktur	Level 3 Integrated	Level 3 Integrated	Level 3 Integrated	Inspektorat
		Jumlah Aparatur Inspektorat yang mengikuti Diklat/Bimtek/Seminar	25 orang	19 orang	23 orang	23 orang	
		Jumlah dokumen infrastruktur kapabilitas	6 elemen kapabilitas	6 elemen kapabilitas	6 elemen kapabilitas	6 elemen kapabilitas	
<b>H. AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>							
1. Standar Pelayanan							
Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan/ Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Penyusunan Laporan Evaluasi SPM	Jumlah laporan SPM	6 SPM	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Bagian Ortala
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Pelaksanaan ISO Pelayanan Publik	Jumlah Serifikat ISO		1 ISO	1 ISO	1 ISO	DPMPSTP
	Evaluasi ISO Pelayanan Publik	Jumlah Evaluasi			1 Kali	2 Kali	DPMPSTP
Peningkatan Kualitas Perencanaan	Surveillance ISO untuk Penyusunan RKPD	Jumlah ISO		1 sertifikat	1 sertifikat	1 sertifikat	BAPPEDA
2. Budaya Pelayanan Prima (Penerapan Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan)							
Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan/ Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Penyusunan Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah dokumen evaluasi kinerja UPP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Bagian Ortala

Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Peningkatan Kualitas SDA	Bimbingan Teknis Pelayanan Publik pada PD	Jumlah peserta bimtek	45 orang	50 orang	50 orang	50 orang	
<b>3. Pengelolaan Pengaduan</b>							
Pengembangan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan pelayanan pengaduan publik	Jumlah Layanan Pengaduan		1000 pengaduan terlayani	260 pengaduan setiap bulan	280 pengaduan setiap bulan	Diskominfo
	Pelayanan Pengaduan Emergency Call 112	Jumlah Peralatan emergency call		4 Set	4 Set	4 set	
		Jumlah SDM Layanan Pengaduan emergency call		4 orang	4 orang	4 orang	
<b>4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (pemeringkatan)</b>							
Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penyusunan Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik	Dokumen Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik PD yang melaksanakan PP dengan dengan nilai IKM kategori "baik"	1 dokumen 75%	1 dokumen 100%	1 dokumen 100%	1 dokumen 100%	Bagian Ortala
<b>I. QUICK WINS / INOVASI</b>							
<b>1. Terwujudnya "Satu PD, Satu Inovasi" sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014</b>							
Peningkatan inovasi daerah	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Jumlah Inovasi yang dikembangkan		1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	BAPPEDA
	Penelitian Inovatif	Jumlah Penelitian		5 Penelitian	5 Penelitian	5 Penelitian	
<b>2. Terwujudnya Pelayanan Perizinan Online pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>							
Peningkatan Kualitas Perizinan	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Online	Persentase jenis Izin yang dilaksanakan secara online		30 izin	50 izin	63 izin (100%)	DPMPSTP